

**PENGARUH *WEALTH*, *LEVERAGE* DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2019)**

***THE EFFECT OF WEALTH, LEVERAGE AND REGIONAL EXPENDITURE
ON REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE
(Case Study in Provincial Governments in Indonesia in 2019)***

Sheila Salsabilla¹, Sri Rahayu²

^{1,2} Universitas Telkom, Bandung

sheilasalsabilla@student.telkomuniversity.ac.id¹, sriahayu@telkomuniversity.ac.id²

Abstrak

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan gambaran atas tingkat pencapaian hasil kerja yang ditetapkan melalui ketentuan perundang-undangan meliputi penerimaan dan belanja daerah dalam satu periode anggaran. Pengukuran kinerja keuangan dimaksudkan untuk mengevaluasi hasil kinerja keuangan demi terciptanya akuntabilitas publik serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Wealth*, *Leverage*, dan Belanja Daerah secara simultan maupun secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia tahun 2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari *website* resmi Kementerian Keuangan. Pengukuran kinerja keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan hipotesis. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan sampel jenuh sehingga sampel yang digunakan terdiri dari 34 Provinsi di Indonesia dengan total data yang dipakai berjumlah 34 data. Model analisis dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Berganda dengan menggunakan software IBM SPSS Statistic 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Wealth*, *Leverage*, dan Belanja Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Secara parsial, variabel *Wealth* dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan variabel *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur penelitian selanjutnya, dapat meneliti dengan sampel lebih banyak, rentang waktu lebih panjang serta variabel lain yang dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Diharapkan bagi Pemerintah Provinsi di Indonesia dapat melakukan evaluasi Kinerja Keuangan dengan memaksimalkan seluruh potensi serta anggaran yang dimilikinya.

Kata Kunci : *Wealth*, *Leverage*, Belanja Daerah, Rasio Efisiensi, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Abstract

Financial performance of Local Governments is a depiction of the level of achievement that is set through the provisions of the legislation including regional revenues and expenditures in one budget period. Financial performance measurement is intended to evaluate the results of financial performance in order to create public accountability and achieve the goals that have been set. This study aims to analyze the effects of Wealth, Leverage, and Regional Expenditures simultaneously or partially on the Financial Performance of Provincial Governments in Indonesia in 2019. The data used in this study were obtained from the official website of the Ministry of Finance. The measurement of financial performance in this study was conducted using the Efficiency Ratio. This study used quantitative methods with descriptive and hypothetical research types. The sampling technique used saturation sampling method so that the sample used consisted of 34 provinces in Indonesia with a total of 34 data used. The analysis model in this study is Multiple Regression Analysis using IBM SPSS statistics 25 software. The results of this study show that the variables of Wealth, Leverage, and Regional Expenditures simultaneously affect the Financial Performance of Local Governments. Partially, the Wealth and Regional Expenditures variables significantly affect the financial performance of local governments, while the Leverage variable does not affect the Financial Performance of Local Governments. This study is expected to be used as literature for the next researches, to be able to investigate with more samples not only the Provincial Government but also the Regency or City in Indonesia, a longer time span and other variables that can affect the Financial Performance of Local Governments. The Provincial Government in Indonesia is expected to evaluate Financial Performance by maximizing all its potential and budget.

Keywords: *Wealth, Leverage, Regional Expenditures, Efficiency Ratio, and Financial Performance of Local Governments.*

1. Pendahuluan

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan gambaran atas tingkat pencapaian hasil kerja dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui kebijakan atau ketentuan perundang-undangan yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dalam satu periode anggaran^[1]. Pengukuran kinerja keuangan dimaksudkan untuk mengevaluasi hasil kinerja keuangan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam terciptanya akuntabilitas publik yang merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas hasil dari pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan^[2]. Akuntabilitas menunjukkan kemampuan pemerintah dalam

mengelola uang publik yang harus dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien bukan hanya melihat kemampuan bagaimana uang publik dibelanjakan^[3].

Permasalahan mengenai efisiensi serta efektivitas kinerja pemerintah daerah di Indonesia, Ketua Badan Pengawas Keuangan atau BPK menemukan sebesar 5.480 permasalahan pengelolaan anggaran pemerintah pusat dan sebesar 4.095 terkait anggaran pemerintah daerah. Hasil temuan tersebut tentu berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan, dan sangat didominasi oleh permasalahan tidak efektif dan efisien. Ketua Badan Pengawas Keuangan (BPK) mengatakan bahwa sebanyak 51% atau 2.785 masalah ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan mencapai Rp1,35 triliun. Hal tersebut tercatat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019^[4].

Pengukuran kinerja keuangan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rasio Efisiensi. Rasio efisiensi merupakan gambaran besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dibandingkan dengan realisasi pendapatan yang diterima^[5]. Rasio efisiensi dapat dikatakan efisien jika persentase kinerja keuangan berada dibawah 100%^[2].

2. Dasar Teori dan Metodologi

2.1. Dasar Teori

2.1.1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan kinerja keuangan ialah untuk dapat menilai kinerja keuangan suatu organisasi yang digunakan sebagai laporan operasi kegiatan pemerintahan dengan melihat pada efisiensi serta dalam mengawasi atau mengontrol biaya aktual dengan biaya yang telah dianggarkan^[5]. Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan beberapa rasio kinerja, yaitu Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian^[6].

Penulis menggunakan rasio efisiensi karena rasio tersebut dapat menjadi tolak ukur dalam melihat sejauh mana pemerintah daerah dapat mengelola keuangan yang dimiliki serta mampu meningkatkan perekonomian daerahnya hingga dapat dikatakan bahwa kinerja pemerintah daerah tersebut sudah berjalan secara efisien. Kinerja pemerintah daerah dengan hasil kurang dari satu atau dibawah 100% dapat dikatakan kinerja pemerintah daerah tersebut efisien, dengan kata lain semakin kecil rasio efisiensi berarti bahwa kinerja pemerintah daerah akan semakin baik^[7].

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2.1.2. Wealth

Wealth atau yang dapat disebut juga kekayaan atau kemakmuran merupakan kemampuan dalam mencapai kebutuhan suatu daerah^[2]. Tingkat kemakmuran daerah (*Wealth*) mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam memaksimalkan setiap potensi menjadi sumber pembiayaan daerahnya, oleh karena itu PAD digunakan sebagai indikator tingkat kemakmuran daerah^[8].

$$\text{Wealth} = \text{Ln Pendapatan Asli Daerah (PAD)}$$

Kemakmuran daerah (*Wealth*) mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam memaksimalkan setiap potensi menjadi sumber pembiayaan daerahnya, oleh karena itu PAD digunakan sebagai indikator tingkat kemakmuran daerah^[8]. Dengan demikian, pemerintah daerah yang memiliki nilai PAD tinggi akan semakin mudah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya serta akan meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik, dengan meningkatnya pelayanan publik serta pemenuhan kebutuhan daerahnya hal tersebut menandakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah telah berjalan secara efisien.

2.1.3. Leverage

Leverage merupakan besarnya aset daerah yang dibiayai oleh utang dengan alasan daerah tersebut tidak mampu membiayai daerahnya dengan modal sendiri^[9]. Secara garis besar, rasio utang atau *Leverage* ini dinilai menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan tingkat kesehatan serta kemandirian finansial pemerintah daerah karena berkaitan dengan utang^[2]. Proksi *Leverage* pada penelitian ini dihitung menggunakan *Debt to Equity Ratio*.

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Debt}}{\text{Equity}}$$

Leverage merupakan perbandingan antara utang dengan modal yang dimiliki, dengan semakin tingginya rasio *Leverage* yang dimiliki pemerintah daerah maka menandakan semakin rendah pula kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Pemerintah daerah yang memiliki rasio *Leverage* tinggi cenderung tidak memperhatikan tingkat utang dalam upaya memperbaiki kinerjanya, maka hal tersebut juga tidak mendorong pemerintah daerah untuk dapat memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerahnya^[9].

2.1.4. Belanja Daerah

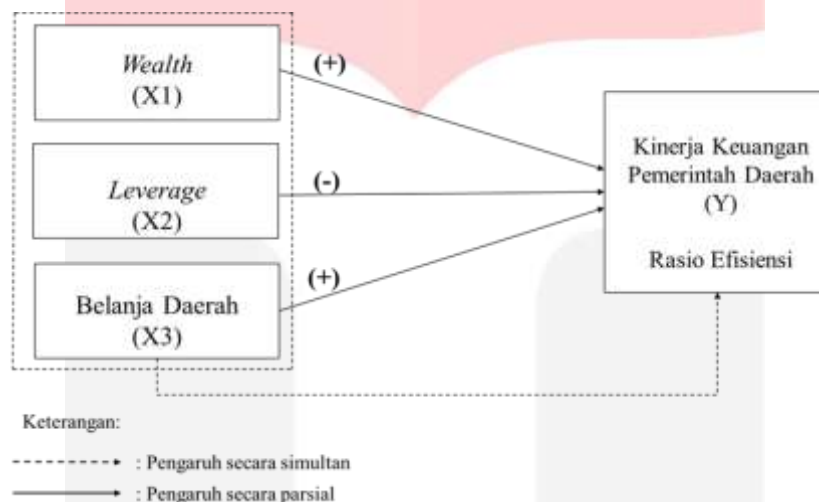
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah dipergunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan serta urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dengan

pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan perundang-undangan.

Belanja Daerah merupakan seluruh pengeluaran kas daerah atau seluruh kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, Belanja Daerah dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan Total Realisasi Belanja Daerah^[10].

$$\text{Belanja Daerah} = \text{Ln Total Realisasi Belanja Daerah}$$

Belanja Daerah merupakan suatu kewajiban pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta pemenuhan kewajiban daerah tersebut dengan memaksimalkan anggaran yang dimilikinya. Semakin tinggi belanja pemerintah daerah maka akan semakin tinggi juga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat^[11]. Dengan semakin tinggi pelayanan yang diberikan, maka semakin banyak juga belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang tentu harus dikelola secara efisien agar dapat mempermudah dalam menjalankan program pembangunan pada daerah tersebut^[10]. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : *Wealth, Leverage* dan Belanja Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
 H2 : *Wealth* berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
 H3 : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
 H4 : Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Keuangan Daerah

2.2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2019. Dalam penelitian ini digunakan teknik sampel jenuh dan diperoleh sebanyak 34 unit sampel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dan analisis regresi berganda dengan menggunakan *software* IBM SPSS *Statistic* 25. Analisis regresi berganda dipilih penulis karena terdapat lebih dari satu variabel independen dalam penelitian ini.

Tahapan dalam analisis penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif yang digunakan untuk dapat memberikan informasi deskriptif mengenai suatu data dengan melihat pada rata-rata (*mean*), maksimum, minimum serta standar deviasi. Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri atas Uji Normalitas, uji ini untuk dapat mengetahui apakah data terdistribusi secara normal atau tidak dalam model regresi antar variabel dependen dan independen. Uji Heteroskedastisitas untuk mengetahui ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan terhadap pengamatan lainnya, biasanya berbentuk pola tertentu seperti titik-titik ataupun berbentuk pola tertentu yang teratur. Uji Autokorelasi untuk mengetahui adanya korelasi antara kesalahan-pengganggu pada periode saat ini dengan kesalahan-pengganggu pada periode sebelumnya. Uji Multikolinieritas untuk menemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas.

Tahapan pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu Koefisien Determinasi (R^2) digunakan sebagai alat ukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, Antara nol atau satu merupakan nilai dari koefisien determinasi, Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F) dilakukan untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh bersamaan dengan variabel dependen, uji F dilakukan melalui tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$), dan Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t) menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi dependen, uji t dilakukan melalui tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$)^[12].

3. Pembahasan

3.1. Statistik Deskriptif

Tabel 3.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
EFISIENSI	34	.8174	1.0627	.9911	.0494
WEALTH	34	26.567	31.4532	28.440	1.1844
LEVERAGE	34	.0039	.1280	.0341	.0298
BELANJA DAERAH	34	28.293	31.804	29.568	.8431
Valid N (listwise)	34				

Sumber: data SPSS diolah, 2021.

Dari hasil tabel analisis deskriptif diatas dapat diketahui bahwa dari keseluruhan variabel dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa hasil dari rata-rata atau mean lebih besar dari standar deviasi pada masing-masing variabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini cenderung bersifat mengelompok atau tidak bervariasi. Hasil analisis deskriptif pada masing-masing variabel akan dijelaskan sebagai berikut.

3.2. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

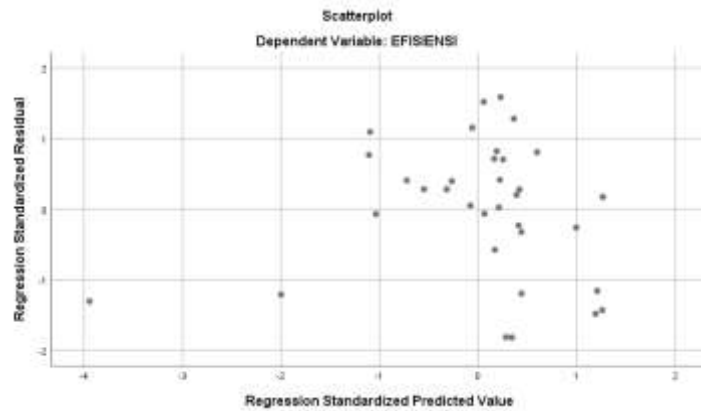
Tabel 3.2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		34
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.03891088
Most Extreme Differences	Absolute	.123
	Positive	.123
	Negative	-.118
Test Statistic		.123
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: data SPSS diolah, 2021.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang didapatkan sebesar $0,200 > 0,05$ yang memiliki arti bahwa data tersebut terdistribusi secara normal. Berdasarkan hipotesis diatas maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dengan data residual berdistribusi normal dengan Sig $0,200 > 0,05$.

b) Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3.2
Hasil Grafik Scatterplot
Sumber: data SPSS diolah, 2021.

Berdasarkan gambar diatas, hasil *Scatterplot* diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar tidak membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi tersebut.

c) Uji Autokorelasi

Tabel 3.3 Hasil Uji Durbin Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.618 ^a	.382	.320	.04081007321 2916	2.014
a. Predictors: (Constant), BELANJA DAERAH, LEVERAGE, WEALTH					
b. Dependent Variable: EFISIENSI					

Sumber: data SPSS diolah, 2021.

Hasil pengujian Durbin Watson diatas menunjukkan bahwa hasil 2,014 menunjukkan angka DW di atas +2 yang memiliki arti autokorelasi negatif. Jika autokorelasi tidak terpenuhi, maka untuk mengatasi ini dilakukan Uji Runs Test. Dalam uji runs test ini memiliki syarat jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 (>0,05) maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Hasil pengujian *Runs Test* ditunjukkan dalam Tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.4 Hasil Run Test

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.00760
Cases < Test Value	17
Cases >= Test Value	17
Total Cases	34
Number of Runs	22
Z	1.219
Asymp. Sig. (2-tailed)	.223
a. Median	

Sumber: data SPSS diolah, 2021.

Berdasarkan hasil *Runs Test* diatas menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,223 yang menunjukkan bahwa angka tersebut lebih besar dari 0,05 (>0,05) dengan kata lain 0,223 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi atau tidak terdapat gejala autokorelasi, sehingga asumsi autokorelasi terpenuhi.

d) Uji Multikolonieritas

Tabel 3.5 Hasil Uji Multikolonieritas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	1.415	.292		4.851	.000		
	WEALTH	.063	.015	1.498	4.189	.000	.161	6.200
	LEVERAGE	.227	.242	.137	.939	.355	.969	1.032
	BELANJA DAERAH	-.075	.021	-1.274	-3.560	.001	.161	6.212

a. Dependent Variable: EFISIENSI

Sumber: data SPSS diolah, 2021.

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas diatas menunjukkan bahwa nilai VIF dari ketiga variabel independen tersebut memiliki nilai VIF < 10, diantaranya yaitu *Wealth* sebesar 2,600, *Leverage* sebesar 1,032 dan *Belanja Daerah* sebesar 6,212. Sedangkan nilai tolerance yang dihasilkan dari ketiga variabel tersebut berturut-turut ialah *Wealth* 0,161, *Leverage* 0,969 dan *Belanja Daerah* sebesar 0,161 yang menunjukkan bahwa nilai tolerance ketiga variabel tersebut lebih besar dari 0,10. Maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen tersebut bebas dari masalah multikolonieritas atau tidak terjadi korelasi.

3.3. Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan tabel 3.5 diatas diperoleh hasil perhitungan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$KKPD = 1,415 + 0,063WLTH + 0,227LEV - 0,075BD + \varepsilon$$

- Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 1,415 bernilai positif memiliki arti bahwa variabel independen *Wealth*, *Leverage*, dan *Belanja Daerah* bernilai nol, maka nilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Rasio Efisiensi akan sebesar 1,415.
- Koefisien regresi *Wealth* yang diperoleh sebesar 0,063 bernilai positif menunjukkan arti bahwa setiap kenaikan satu satuan *Wealth* yang dihitung menggunakan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan asumsi bahwa variabel lain bernilai nol, maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada 34 Provinsi di Indonesia tahun 2019 akan meningkat sebesar 0,063.
- Koefisien regresi *Leverage* yang diperoleh sebesar 0,227 bernilai positif memiliki arti bahwa setiap kenaikan satu satuan *Leverage* yang dihitung menggunakan *Debt to Equity Ratio* dengan asumsi bahwa variabel lain bernilai nol, maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat sebesar 0,227.
- Koefisien regresi *Belanja Daerah* diperoleh sebesar -0,075 bernilai negatif memiliki arti bahwa setiap kenaikan satu satuan *Belanja Daerah* yang dihitung menggunakan total Realisasi *Belanja Daerah* dengan asumsi bahwa variabel lain bernilai nol, maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah akan menurun sebesar 0,075.

3.4. Pengujian Hipotesis

- Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)

Tabel 3.7 Hasil Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.031	3	.010	6.170	.002 ^b
	Residual	.050	30	.002		
	Total	.081	33			

a. Dependent Variable: EFISIENSI
b. Predictors: (Constant), BELANJA DAERAH, LEVERAGE, WEALTH

Sumber: data SPSS diolah, 2021.

Pada tabel diatas diperoleh nilai Sig. sebesar 0,002. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai Sig. $0,002 < 0,05$ yang memiliki arti bahwa variabel independen yaitu *Wealth*, *Leverage*, dan *Belanja Daerah* secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Rasio Efisiensi sehingga dapat dikatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.

- Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

Hasil pengujian hipotesis parsial (Uji t) pada variabel independen yaitu *Wealth*, *Leverage*, dan *Belanja Daerah*

terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan tabel diatas ialah sebagai berikut.

- a. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *Wealth* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga, variabel *Wealth* berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
 - b. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,355 lebih besar dari 0,05 ($0,355 > 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga, variabel *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
 - c. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga, variabel Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- c) Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 3.8 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.618 ^a	.382	.320	.0408100732 12916	2.014
a. Predictors: (Constant), BELANJA DAERAH, LEVERAGE, WEALTH					
b. Dependent Variable: EFISIENSI					

Sumber: data SPSS diolah, 2021.

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi pada tabel diatas diperoleh hasil adjusted R sebesar 0,320 atau sama dengan 32%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variasi dari Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2019 yang dapat dijelaskan oleh variabel *Wealth*, *Leverage*, dan Belanja Daerah ialah sebesar 32% sedangkan sisanya 68% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Adapun pembahasan hasil penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pengaruh *Wealth*, *Leverage*, dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 3.7 diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu *Wealth*, *Leverage*, dan Belanja Daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2019. Berpengaruh signifikan dalam penelitian ini memiliki arti bahwa jika seluruh anggaran diawasi serta dikelola dengan baik dan benar maka akan semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Kinerja keuangan yang baik menandakan bahwa kinerja keuangan tersebut telah berjalan secara efisien.
- b) Pengaruh *Wealth* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 3.5 diperoleh nilai signifikansi sebesar sebesar 0,000 kurang dari $\alpha = 0,05$ dengan t-statistic sebesar 0,063. Maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima. Sehingga, variabel *Wealth* berpengaruh positif terhadap variabel dependen Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2019. Berpengaruh signifikan dalam penelitian ini memiliki arti bahwa semakin besar atau semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki maka semakin tinggi pula tingkat kemakmuran daerah tersebut yang akan mencerminkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik.
- c) Pengaruh *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 3.5 diperoleh nilai signifikansi sebesar sebesar 0,355 lebih dari $\alpha = 0,05$ dengan t-statistic sebesar 0,227. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima. Sehingga, variabel *Leverage* tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2019. Tidak berpengaruh secara signifikan memiliki arti bahwa dengan adanya perubahan baik itu peningkatan ataupun penurunan, *Leverage* pada pemerintah daerah tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.
- d) Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 3.5 diperoleh nilai signifikansi sebesar sebesar 0,001 $< 0,05$ dengan t-statistic sebesar -0,075. Maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima. Sehingga, variabel Belanja Daerah berpengaruh negatif terhadap variabel dependen Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2019. Berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan memiliki arti bahwa semakin tinggi Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tidak menjamin semakin tinggi pula pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta berdampak pada semakin tinggi kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

4. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah *Wealth*, *Leverage*, dan Belanja Daerah berpengaruh terhadap

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah secara simultan pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2019. Secara parsial *Wealth* berpengaruh positif dan Belanja Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sedangkan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Adapun saran dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pengetahuan bagi pembaca khususnya pada bidang sektor publik mengenai *Wealth*, *Leverage*, Belanja Daerah, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi di Indonesia tahun 2019. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya untuk dijadikan sebagai literatur penelitian selanjutnya, dapat meneliti dengan mengambil sampel yang lebih banyak, rentang waktu yang lebih panjang serta variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Bagi pemerintah daerah pada 34 Provinsi di Indonesia, diharapkan mampu mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara efisien dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki tiap daerahnya karena total pendapatan asli daerah yang menjadi proksi dari *Wealth* dapat menggambarkan kinerja keuangan daerah yang efisien, dalam mengukur kinerja dapat secara komprehensif sehingga *Leverage* dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai kinerja namun bukan menjadi satu-satunya tolak ukur dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah karena dengan lebih memperhatikan tingkat *Leverage* ini juga dapat meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola dana yang diperoleh dari pinjamannya, dan mengoptimalkan Belanja Daerah yang dimilikinya karena dengan menggunakan total realisasi belanja daerah sebagai proksi Belanja Daerah dapat mencerminkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang efisien.

Referensi

- [1] Natoen, A., Febrianti, A., Sarikadarwati, & Ardiani, S. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Sumatera Selatan (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Sumatera Selatan Tahun 2013-2017). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 3(2), 106–117.
- [2] Kusuma, A. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(1), 404–420.
- [3] Kartim, & Novia, R. (2019). Pengaruh Size, Wealth, Leverage, Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Papua. *Accounting Journal Universitas Yapis Papua*, 1(1), 29-37
- [4] Prabawanti, M. A. H. (2020). BPK Temukan 5.480 Permasalahan Pengelolaan Anggaran Pusat dan Daerah. [online]. <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/06/15515011/bpk-temukan-5480-permasalahan-pengelolaan-anggaran-pusat-dan-daerah> [Accessed 25 November 2020]
- [5] Satria, D. I., & Sari, H. P. (2018). Wealth, Intergovernmental Revenue, Leverage. *At-Tasyri*, X, 9–21.
- [6] Siregar, A. O. D., & Mariana, I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus : Pemerintahan Kota Depok – Jawa Barat). 9(1), 1–19.
- [7] Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>
- [8] Hidayat, M. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Perusahaan. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan*, 2(5), 19–42. <https://doi.org/10.24912/jmbk.v2i5.4877>
- [9] Dewata, E., Ilmiyyah, N. M., & Sarikadarwati, S. (2017). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 5(1), 147. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v5i1.446>
- [10] Noviyanti, N. A., & Kiswanto. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 12(3), 234–247.
- [11] Nugroho, T. R., & Prasetyo, N. E. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten & Kota di Jawa Timur (Influence of Characteristics of Government Areas Of Performance Finance Government Regional District & Municipality in Jawa Timur). *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 27.
- [12] Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9). Badan Penerbit-Undip.

